



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH BELANJA MODAL DAN DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI BALI**

SKRIPSI

Dinny Anggraenih

1002025025

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2015

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul "PENGARUH BELANJA MODAL DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI" merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagian bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya. Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 10 Januari 2015



(Dinny Anggraenih)
NPM 1002025025

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

JUDUL : **PENGARUH BELANJA MODAL DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI**

NAMA : **DINNY ANGGRAENIH**

NPM : **1002025025**

PROGRAM STUDI : **S1 AKUNTANSI**

TAHUN AKADEMIK : **2015**

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi:

Pembimbing I	Fitrisia, S.E., AK., M.Si	
Pembimbing II	M. Nurrasyidin, S.E., M.Si	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA


Bambang Tutuko, S.E., Ak., M. Si.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul :
**PENGARUH BELANJA MODAL DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI**

Disusun oleh :
Dinny Anggraenih
1002025025

Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian kesarjanaan strata-satu
(S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Prof. DR. HAMKA
Pada tanggal : 10 Januari 2015

Tim Penguji:

Ketua, merangkap anggota :

(Bambang Tutuko, S.E., Ak., M.Si)

Sekretaris, merangkap anggota :

(M. Nurasyidin, S.E., M.Si)

Anggota :

(Ir. Tukiran, M.M)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

(Bambang Tutuko, S.E., Ak., M. Si)

(Nuryadi Wijiharjono, S.E., M. M)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinny Anggraenih
NPM : 1002025025
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Jenis Karya : Skripsi

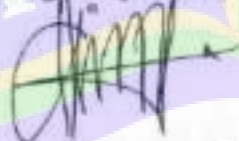
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalti Free-Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"PENGARUH BELANJA MODAL DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Januari 2015
Yang menyatakan,



(Dinny Anggraenih)
NPM 1002025025

ABSTRAK

Dinny Anggraenih (1002025025)

PENGARUH BELANJA MODAL DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI.

Skripsi. Program Strata Satu, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2015. Jakarta.

Kata Kunci : Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2008 sampai dengan tahun 2013.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi, yaitu untuk mengetahui atau menjelaskan pengaruh antara variabel satu terhadap variabel lain. Variabel yang diteliti adalah variabel x yaitu Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan variabel y adalah Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Dengan jumlah sampel 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan untuk periode 2008-2013. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data Sekunder yang digunakan diperoleh melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data yang dianalisis dalam penelitian ini diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Hasil penelitian memperoleh persamaan regresi linear berganda $\hat{Y} = 51,419 + 0,117X_1 - 1,052X_2$ yang menunjukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi, tidak terdapat multikolinieritas, tidak terdapat heteroskedastisitas, dan tidak terdapat autokorelasi sehingga persyaratan *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE) telah terpenuhi.

Berdasarkan uji signifikansi menunjukkan bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif

terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan nilai signifikansi 0,000, sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa belanja modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan tingkat signifikansi 0,000.

Berdasarkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,581 menunjukkan bahwa 58,1% variabel dependen yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu belanja modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan sisanya 41,9% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari hasil penelitian ini disarankan kepada pemerintah daerah Provinsi Bali disarankan agar lebih menciptakan daerah Bali yang bersih dan nyaman untuk turis asing yang ingin berlibur, dengan adanya turis asing dan masyarakat lokal yang ingin berlibur di Bali sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka pemerintah daerah bisa membelanjakan keperluan daerahnya tanpa harus lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

ABSTRACT

Dinny Anggraenih (1002025025)

THE INFLUENCE OF CAPITAL EXPENDITURES AND SPECIAL ALLOCATION FUND TO LEVEL OF LOCAL FINANCIAL INDEPENDENCE ON THE DISTRICT/CITY IN THE PROVINCE OF BALI.

Thesis. Bachelor Degree, Program of Accounting, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, 2015. Jakarta.

Keywords: Capital Expenditure, Special Allocation Fund, and Level of Local Financial Independence.

This research aims to know the influence of capital expenditures and special allocation fund to level of local financial independence on the district/city in the province of Bali in 2008 to 2013.

This research use the explanation method, namely to determine or explain the influence of one variable to another variable. The researched variables are X variable, namely capital expenditures and special allocation fund, and Y variable, namely the level of local financial independence. The number of samples 9 (nine) district/city in the province of Bali. This research was conducted for the period 2008-2013. Data used in this research is secondary data. Secondary data used were obtained through the Supreme Audit Agency (BPK). The data analyzed in this study is processed from Realization Report the Annual Budget (Budget).

The results of this research obtain multiple linear regression equation $\hat{Y} = 51,419 + 0,117X_1 - 1,052X_2$ shows that the assumption of normality is met, there is no multicollinearity, heteroscedasticity there, and so there is no requirement autocorrelation Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) have been met.

Based on significant test shows that partially capital expenditure influence to level of local financial independence with significant value 0,000, allocation fund special negative influence to level of local financial independence with significant value 0,000, while at the same time show that the capital expenditure

and special allocation fund have significant influence to level of local financial independence with significant level 0,000.

Based on the value of Adjusted R Square of 0,581 shows that 58,1% level of local financial independence dependent variable can be explained by the independent variables are capital expenditure and special allocation fund. While the remaining 41,9% can be explained by other variables that are not addressed in this research, such as the sharing fund, general allocation fund, and locally generated revenue.

From the results of this study suggested the provincial government of Bali is suggested that further create areas of Bali which is clean and comfortable for foreign tourists who want to vacation, the presence of foreign tourists and local people who want to vacation in Bali increase so that locally generated revenue mentioned. With increasing locally generated revenue local governments can spend their area needs without having to again get help from the central government .

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **"Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali"**. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Kedua orang tua, yang selalu memberikan dukungan moril dan berbagai fasilitas yang diperlukan penulis.

Maksud dan tujuan menyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan agar mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Nuryadi Wijihardjono, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Nur Hadiyazid Rachman, S.Si., M.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof., DR. HAMKA.
4. Bapak Zulpahmi, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof., DR. HAMKA.
5. Bapak Bambang Tutuko, S.E., Ak., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Ibu Fitriisia, S.E., Ak., M.Si., selaku Dosen pembimbing I (satu) yang telah memberikan bimbingan, saran, serta arahan sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan. Penulis haturkan terima kasih semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan kesabaran dalam membimbing penulis.

7. Bapak M. Nurrasyidin, S.E., M.Si., selaku Dosen pembimbing 2 (dua) yang telah memberikan bimbingan, saran, serta arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis haturkan terima kasih semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah memberikan informasi dan arahan tentang skripsi sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi hingga selesai.
9. Pengurus perpustakaan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah meminjamkan buku-buku yang saya butuhkan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
10. Staf Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang telah bersedia memberikan data Laporan Hasil Pemeriksaan kepada penulis.
11. Kedua kakak dan adik saya tercinta yang selalu mendoakan dan *men-suport* saya sehingga skripsi ini terselesaikan.
12. Sahabat tercinta saya Rhina, Dodi, Bule, Ayu, Dani dan Shara yang selalu mendoakan dan menyemangati saya untuk selalu bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Mas Adhy dan pak Sumiadi (RAMA NET) yang selalu memberikan saya kortingan prinan setiap *nge-print*.
14. KBS (Nita, Hani, Shofa, Lora) yang selalu memberikan semangat setiap hari dalam canda dan tawa, suka maupun duka.
15. Teman-teman seperjuangan Diana, Tiwi, Nur Dwi, Fitri dan Ambar yang telah memberikan bantuan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
16. Semua teman-teman seperjuangan akuntansi angkatan 2010 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah memberikan bantuan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
17. Teman-teman kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

18. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyajian dan penulisan skripsi ini mengingat keterbatasan waktu, biaya, tenaga, kemampuan dan pengetahuan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

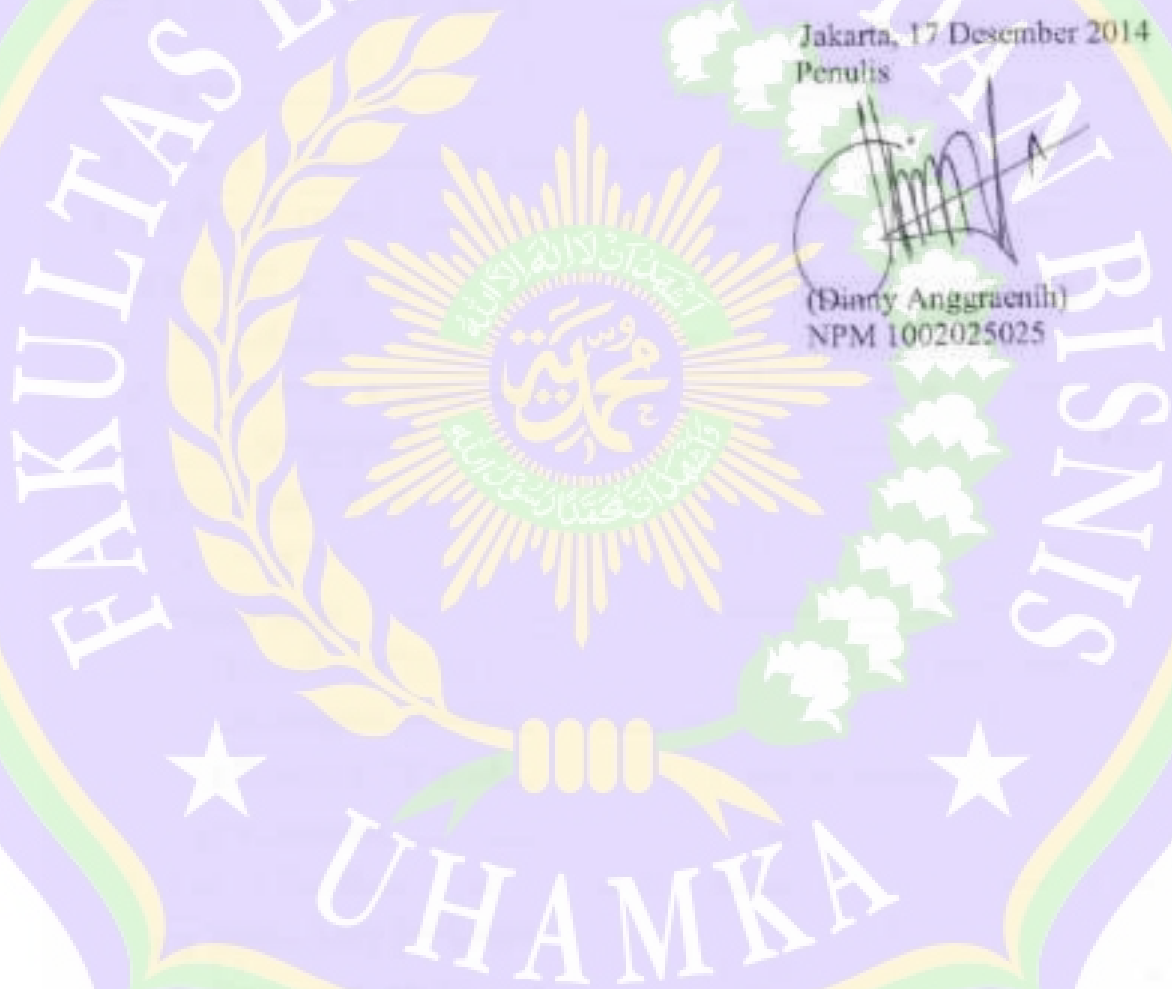
Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh semua pembaca sebagai sumbangan ilmiah bagi para pembaca.

Jakarta, 17 Desember 2014

Penulis



(Diany Anggraenih)
NPM 1002025025



DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	7
1.2.3 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu	9
2.2 Telaah Pustaka	15
2.2.1 Pengertian Akuntansi.....	15
2.2.2 Akuntansi Sektor Publik	16
2.2.2.1 Definisi Akuntansi Sektor Publik.....	16

2.2.2.2	<i>Karakteristik Organisasi Pemerintahan</i>	16
2.2.2.3	<i>Ciri Khas dan Tujuan Akuntansi Pemerintahan</i>	17
2.2.3	<i>Standar Akuntansi Pemerintahan</i>	19
2.2.3.1	<i>Pengertian dan Fungsi SAP</i>	19
2.2.3.2	<i>Proses Penyusunan SAP</i>	19
2.2.3.3	<i>Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan</i>	20
2.2.4	<i>Otonomi Daerah</i>	21
2.2.4.1	<i>Pengertian Otonomi Daerah</i>	21
2.2.4.2	<i>Prinsip-prinsip Pembertian Otonomi Daerah</i>	22
2.2.5	<i>Laporan Keuangan Daerah</i>	22
2.2.6	<i>Belanja Modal</i>	25
2.2.6.1	<i>Definisi Belanja Modal</i>	25
2.2.6.2	<i>Jenis-jenis Belanja Modal</i>	26
2.2.7	<i>Dana Alokasi Khusus</i>	28
2.2.8	<i>Kemandirian Keuangan Daerah</i>	33
2.3	<i>Kerangka Pemikiran Teoritis</i>	35
2.4	<i>Rumusan Hipotesis</i>	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	<i>Metode Penelitian</i>	39
3.2	<i>Operasionalisasi Variabel</i>	39
3.3	<i>Populasi dan Sampel</i>	41
3.4	<i>Teknik Pengumpulan Data</i>	43
3.4.1	<i>Tempat dan Waktu</i>	43
3.4.2	<i>Teknik Pengumpulan Data</i>	43
3.5	<i>Teknik Pengolahan dan Analisis Data</i>	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	<i>Gambaran Umum Objek Penelitian</i>	49
4.1.1	<i>Sejarah Singkat Lokasi Penelitian</i>	49
4.1.2	<i>Keadaan Geografis Objek Penelitian</i>	52
4.1.3	<i>Kondisi Demografis Objek Penelitian</i>	53
4.2	<i>Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan</i>	55

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	55
4.2.1.1 Belanja Modal	55
4.2.1.2 Dana Alokasi Khusus	61
4.2.1.3 Kemandirian Keuangan Daerah	67
4.2.2 Analisis Akuntansi	71
4.2.2.1 Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	72
4.2.2.2 Pengaruh DAK terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	76
4.2.2.3 Pengaruh Belanja Modal dan DAK terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	81
4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda	85
4.2.4 Uji Asumsi Klasik	87
4.2.5 Analisis Koefisiensi Determinasi (R^2)	92
4.2.6 Uji Hipotesis	93
4.3 Ringkasan Hasil Pengolahan dan Analisis Data	98
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran-saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Data Laporan Realisasi APBD tahun 2008-2013.....	5
2.	Ringkasan Penelitian Terdahulu	12
3.	Kriteria Umum, Khusus, dan Teknis dalam Penggunaan DAK	30
4.	Operasional Variabel.....	40
5.	Populasi Penelitian	42
6.	Belanja Modal Tahun 2008-2013	56
7.	Dana Alokasi Khusus Tahun 2008-2013	62
8.	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	67
9.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tahun 2008-2013	68
10.	Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	72
11.	Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	77
12.	Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	82
13.	Analisis Statistik Deskriptif Variabel	84
14.	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	86
15.	<i>One Sample</i> Kolmogorov Smirnov	88
16.	Hasil Uji Multikolinearitas	89
17.	Hasil Uji Autokorelasi	91
18.	Koefisien Determinasi	93
19.	Uji Statistik t	94
20.	Uji Statistik F	96

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Skema Kerangka Pemikiran Teoritis	37
2.	Grafik <i>P-P Plot</i>	87
3.	Grafik Scatterplot	90
4.	Kurva Daerah Pengujian Durbin Watson	92
5.	Kurva Pengujian Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	95
6.	Kurva Pengujian Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	96
7.	Kurva Pengujian Pengaruh secara Simultan Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	97

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Formulir Pengajuan Persetujuan Judul Proposal Skripsi.....	1/18
2.	Formulir Pengajuan Perubahan Judul Skripsi	2/18
3.	Surat Tugas	3/18
4.	Catatan Konsultasi Pembimbing I	4/18
5.	Catatan Konsultasi Pembimbing II	5/18
6.	Formulir Permohonan Informasi Publik	6/18
7.	Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik	7/18
8.	Rekapitulasi Belanja Modal 2008-2013	8/18
9.	Rekapitulasi Dana Alokasi Khusus 2008-2013	9/18
10.	Rekapitulasi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 2008-2013	10/18
11.	Hasil Output SPSS 20.0.....	11/18
12.	Tabel Uji Statistik t	17/18
13.	Tabel Uji Statistik F.....	18/18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia mulai 1 Januari 2001 yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004, menghendaki daerah untuk berkreasi mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Sesuai asas *money follows function*, penyerahan kewenangan daerah juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya terfokus kepada dana bantuan dari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja. Lebih penting dari itu adalah daerah dapat mandiri untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk kemandirian keuangan daerah dengan memanfaatkan dan mendayagunakan, serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Dengan demikian daerah menjadi mampu

untuk melaksanakan segala urusan pemerintahannya sendiri karena sumber-sumber pembiayaan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Apabila mekanisme tersebut sudah terwujud maka cita-cita kemandirian daerah dapat direalisasikan.

Sumber-sumber pembiayaan yang diserahkan kepada daerah itu nantinya akan dimanifestasikan lewat struktur PAD yang kuat. PAD inilah sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah, apabila struktur PAD kuat, maka dapat dikatakan daerah tersebut mempunyai kemampuan pembiayaan yang juga kuat sehingga dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Seperti Belanja Modal sebagian besar berasal dari PAD itu artinya pemerintah daerah mampu membelanjakan jenis-jenis belanja modal dengan hasil PAD-nya. Jenis-jenis belanja modal yang dimaksud adalah belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, perbaikan jalan dan infrastruktur lainnya yang memiliki masa manfaatnya 1 periode akuntansi. Maka dari itu belanja modal mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pada daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan daerah yang masih rendah. Sehingga dalam upaya peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif. Pergeseran komposisi belanja ini ditujukan untuk peningkatan investasi

modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD.

Namun terdapat kendala dalam implementasi otonomi daerah, yaitu adanya kesenjangan fiskal antar daerah. Untuk itu, pemerintah pusat memberikan bantuan (transfer) kepada pemerintah daerah, salah satunya dengan pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK). Realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam mengatur rumah tangga daerah, yang ditunjukkan dengan adanya ketergantungan yang lebih besar kepada Dana Alokasi Khusus (DAK) dibandingkan Pendapatan Asli Daerah dalam mendanai belanja daerah. Dominannya peran transfer relatif terhadap PAD dalam membiayai belanja pemerintah daerah sebenarnya tidak memberikan panduan yang baik bagi pemerintahan terhadap aliran transfer itu sendiri, maka dapat dikatakan tidak mandiri daerah tersebut.

Salah satu tugas penting dari pemerintahan daerah adalah menyediakan dan membangun infrastruktur publik melalui alokasi Belanja Modal pada APBD. Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Namun, berdasarkan data dan hasil kajian yang ada, seringkali ditemukan fakta bahwa Realisasi Belanja Modal pada APBD di akhir tahun seringkali di bawah target atau lebih rendah dibandingkan dengan anggarannya. Sebagai

contoh, pada tahun anggaran 2011 dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia (agregat provinsi, kabupaten, dan kota) realisasi Belanja Modal adalah Rp. 108,127 triliun sementara anggarannya adalah Rp. 113,523 triliun, sehingga Belanja Modal terealisasi 95,25%. Padahal, dari kajian yang sama juga memperlihatkan bahwa pada tahun yang bersangkutan Realisasi Pendapatan APBD (PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan) lebih tinggi daripada anggarannya, sehingga malah menyebabkan surplus di akhir tahun.

Sebagai perbandingan, beberapa hal yang cukup memprihatinkan justru terlihat bahwa ternyata yang mengalami pelampauan target belanja (dari pagu anggaran induk) cukup tinggi adalah Belanja Pegawai Tidak Langsung, atau biasa orang awam menyebutnya sebagai "Gaji PNSD". Komponen Gaji PNSD tingkat penyerapannya pada realisasi APBD 2011 mencapai 110,60% (realisasi Rp. 224,95 triliun sedangkan pagu anggaran sebesar Rp. 203,39 triliun). Sementara itu belanja modal realisasinya hanya mencapai 95% dari anggaran induk, atau masih kurang Rp. 5,4 triliun dari anggaran. Padahal seharusnya dengan peningkatan alokasi pendapatan transfer dari Pusat (yang informasinya baru didapat pada saat tahun anggaran 2011 berjalan), maka anggaran belanja juga harus segera menyesuaikan sehingga pendapatan daerah bisa semaksimal mungkin teralokasikan untuk belanja yang langsung berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas layanan publik. (sumber: www.djpk.dcpkeu.go.id, Minggu, 23 Maret 2014).

Pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan pembangunan tahun 2008-2013 selain mempertimbangkan hasil yang dicapai tahun sebelumnya, juga

didasarkan pada isu permasalahan aktual, perkembangan kondisi ekonomi nasional, regional maupun global serta melihat prospek perekonomian kedepan yang mendasarkan pada besaran-besaran asumsi makro ekonomi Bali Tahun 2008-2013 termasuk faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi perekonomian Bali.

Berikut ini adalah data-data Laporan Realisasi APBD Tahun 2008-2013 yang didapat dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan):

Tabel 1
Data Realisasi Anggaran Provinsi Bali Tahun 2008-2013

Tahun Realisasi	Keterangan		
	PAD	DAU	DAK
2013	2.529.976.146.703,70	792.365.876.000,00	43.835.380.000,00
2012	2.042.091.095.774,66	694.079.080.000,00	34.025.910.000,00
2011	1.723.807.095.831,05	560.673.539.000,00	15.916.275.000,00
2010	1.393.730.257.045,34	489.942.535.000,00	14.767.069.100,00
2009	1.163.795.305.571,54	471.788.221.000,00	36.108.000.000,00
2008	1.055.500.057.955,84	448.187.419.000,00	12.980.400.000,00

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, data diolah oleh penulis, 2014

Pada kesimpulan tabel di atas, maka provinsi Bali memiliki PAD dan DAU yang setiap tahunnya meningkat sedangkan DAK mengalami penurunan di tahun 2009. Bisa didominasi industri pariwisata masih menjadi tumpuan peningkatan perekonomian Bali.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/kota di Provinsi Bali”.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan alasan pemilihan judul, maka permasalahan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah:

1. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah?
3. Apakah Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk mendapatkan suatu pembahasan yang lebih rinci dan tidak keluar dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi masalah atau ruang lingkup dari masalah yang akan dibahas yaitu pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2008-2013.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut

“Apakah Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali?”

1.3 Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Bagi Penulis

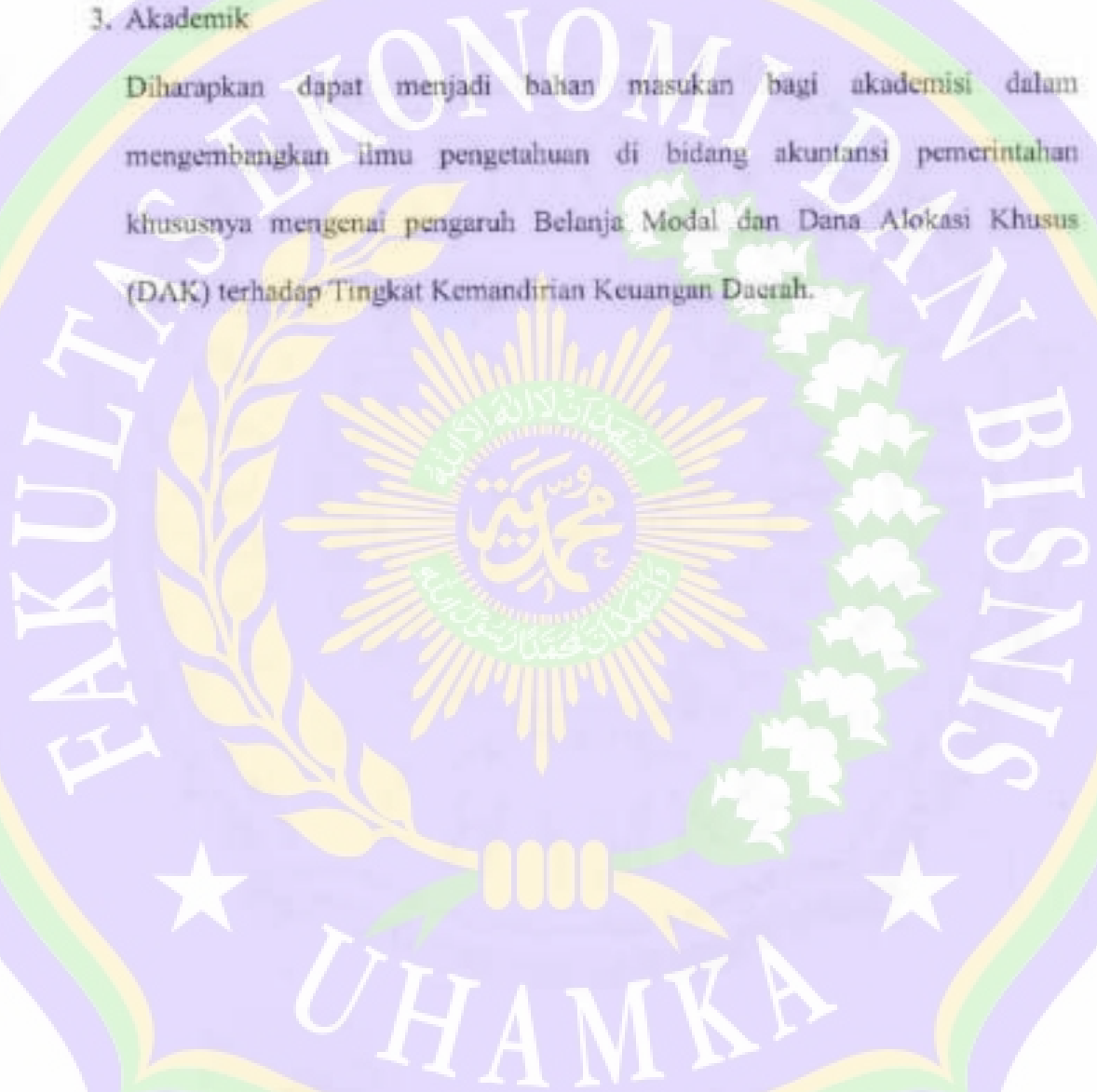
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana, dan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh Pendapatan Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota

Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk melihat kemampuan daerah mengelola sumber daya dan untuk digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun APBD.

3. Akademik

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan khususnya mengenai pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2012). *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah (Edisi 3)*. Jakarta: UPP STIM YKPN
- Agung Abdul Rasul, dan Nuriaelah. (2010). *Praktikum Statistika Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Andi Supangat. (2008). *Satistika: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametrik*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ateng Syarifuddin. (2006). *Kapita Selekta Hakikat Otonomi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Citra Media.
- Deddi Nordiawan. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2013). *Laporan Evaluasi Belanja Modal Daerah*. Diunduh 23 Maret 2014. www.djpk.depkeu.go.id.
- Hanif Nurcholis. (2007). *Teori dan Praktek; Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- HAW. Widjaja. (2007). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Horngren, Charles T, dan Walter T. Harrison. (2007). *Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Ihyaul Ulum M.D (2009). *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Imam Ghozali. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Indonesia Data. (2010). *Daftar Kabupaten dan Kota di Jawa Timur*. Diunduh 13 April 2014. www.indonesiadata.go.id.
- Indra Bastian. (2010). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.

- Kaho, Josep Riwu. (2006). *Prospek Otonomi di Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Grafindo.
- Kurnia Rina Ariani. (2010). *Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tax Effort pada Kabupaten/Kota Wilayah EKS Karesidenan Surakarta*. Skripsi. Surakarta: Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Mohamad Mahsun, Sulistyowati Firma, dan Purwanugraha. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Baru/ADI*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Mudrajad Kuncoro. (2012). *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muindro Renyowijoyo. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Republik Indonesia. (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perimbangan*.
- _____. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- _____. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah*.
- _____. (2004). *Undang-Undang Nomor 36 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005*.
- _____. (2005). *Peraturan Pemerintah Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 01*.
- _____. (2005). *Peraturan Pemerintah Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 02*.
- _____. (2005). *Peraturan Pemerintah Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005*.
- _____. (2008). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- _____. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Reza Marizka. (2013). *Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Sumatera Barat*. Skripsi. Padang: Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Simbolon, Bennyly Pangihutan Jouli. (2011). *Pengaruh Rasio Efektifitas PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintahan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Medan: Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

_____. (2012). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Tim Penyusun. (2013). *Pedoman Penyusunan Skripsi*. FE Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Jakarta.

Warren, Carl S., James M. Reeve, dan Philip E. Fess. (2005). *Pengantar Akuntansi, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.